

HUBUNGAN KOMPLEKSITAS INFORMASI (TRANSAKSI PIHAK BERELASI DAN PENGHINDARAN PAJAK) DAN BIAYA AUDIT

Maretha Primadyan¹, Eliza fatima²

¹Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat, ²Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
Email: Marethaprimadyan@yahoo.com¹, Eliza_fatima@yahoo.com²,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan kompleksitas informasi dan biaya audit. Kompleksitas informasi bersumber dari transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak. Transaksi pihak berelasi diukur dengan penjumlahan transaksi penjualan, pembelian, peminjaman dan pinjaman untuk pihak berelasi. Penghindaran pajak diukur dengan *Cash ETR*. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 – 2017. Sampel final dalam penelitian ini adalah 241 observasi.

Hasil dari penelitian ini adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap biaya audit. Kemudian, transaksi antar pihak berelasi berpengaruh positif terhadap biaya audit. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran kepemilikan institusi terhadap hubungan kompleksitas informasi (transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak) terhadap biaya audit. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan saham institusional dapat memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan biaya audit. Dengan adanya kepemilikan institusi sebagai *external monitoring* yang baik maka pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya audit diharapkan dapat diminimalisir. Seiring dengan pemantauan dari investor institusi, resiko yang dihadapi auditorpun akan berkurang dalam mengaudit dan hal ini akan berdampak pada biaya audit.

Kata kunci: penghindaran pajak, transaksi pihak berelasi, kepemilikan saham institusional, biaya audit

ABSTRACT

The purpose of this paper is to examine the relationship of information complexity and audit fee. The complexity of information comes from related party transaction and tax avoidance. Related party transaction are measured by the sum of sales, purchases, loans and loans between related parties. Tax avoidance is measured by *Cash ETR*. The population of this study is all companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2013-2017. The final sample in this study was 241 observations.

The results of this study are tax avoidance does not have a positive relationship on audit fee. Then, related party transaction have a positive effect on audit fee. In addition, this study also examined the role of institutional ownership on the relationship of information complexity (related party transaction and tax avoidance) to audit fee. This study reveals that institutional ownership has been shown to weaken the relationship between tax avoidance and audit fee. With the existence of institutional ownership as good external monitoring, the effect of tax avoidance on audit fee is expected to be minimized. Along with monitoring of institutional investors, the risks faced by auditors will be reduced in auditing and this will have an impact on audit fee.

Keywords: tax avoidance, related party transaction, institutional ownership, audit fee.

1. Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir ini, biaya audit merupakan salah satu isu yang menarik untuk diteliti dibidang akuntansi, audit dan keuangan. Hal ini terbukti dengan adanya hasil survei mengenai trend biaya audit dari tahun 2015 hingga 2017 yang terus mengalami peningkatan, yang dilakukan oleh Financial Executives Research Foundation (FERF).

Menurut beberapa penelitian terdahulu, biaya audit tersebut dapat mencerminkan upaya audit yang dilakukan oleh auditor. Upaya audit tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan karakteristik perusahaan klien. Karakteristik tersebut dapat berupa ukuran, resiko dan kompleksitas perusahaan (Choi., 2016; Sonu., 2017).

Kompleksitas dalam suatu perusahaan dapat membatasi transparansi informasi, yang mengarah pada asimetri informasi yang substansial. Sehingga perusahaan yang mempunyai informasi keuangan yang kompleks membutuhkan upaya audit yang lebih besar dalam mengaudit laporan keuangannya. Disamping itu, perusahaan yang cenderung kompleks akan meningkatkan resiko audit yang berdampak pada meningkatnya biaya audit (Hung dan Chen., 2018). Penelitian terdahulu telah banyak meneliti pengaruh positif kompleksitas perusahaan terhadap biaya audit (Simunic, 1980; Brinn et al., 1994; Cameran, 2005; Joshi & Bastaki, 2000; Clatworthy & Peel, 2007; Ellis & Booker, 2011; Verbruggen et al., 2011, Hung dan Chen, 2018). Dalam penelitian tersebut, kompleksitas perusahaan diukur melalui kompleksitas operasi (Baker, 1981; Collier & Gregory, 1996; Langendijk, 1997) maupun aset yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan (Chan et al., 1993, Peel & Clatworthy, 2001; Simunic, 1980; Francis, 1984; Francis & Stokes, 1986; Simon & Francis, 1988; Gonthier, B., & Schatt, 2007). Namun, kompleksitas informasi perusahaan dapat juga berasal dari aktivitas penghindaran pajak dan transaksi pihak berelasi (Hung dan Chen. 2018; Hanlon et al, 2012, Kim et al, 2011)

Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan yang dilakukan suatu perusahaan untuk meminimalisir liabilitas pajak. Hal ini disebabkan perusahaan mempunyai suatu insentif untuk memaksimalkan keuntungan dengan meminimalisir pajak perusahaan yang merupakan item penting dalam arus kas keluar (Choi et al., 2011; Lee and Yoon, 2012). Penghindaran pajak

memanfaatkan kelemahan atau celah yang terletak pada regulasi sehingga tindakan tersebut bersifat legal. Namun, akuntansi untuk pajak penghasilan dapat meningkatkan resiko dan kompleksitas perusahaan. Hal ini disebabkan karena manajemen dapat memanfaatkan kerumitan dalam perhitungan beban pajak dan menggunakan diskresi dalam mengestimasi pajak akrual untuk mengelola laba (Graham et al., 2014).

Selain penghindaran pajak, kompleksitas informasi dapat juga berasal dari aktivitas transaksi pihak berelasi. Beberapa tahun belakangan ini, transaksi tersebut banyak menarik perhatian regulator serta investor karena perannya dalam banyak skandal laporan keuangan, baik di US maupun negara lainnya. Banyaknya terjadi skandal laporan keuangan yang melibatkan transaksi pihak berelasi memfokuskan regulator terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi transaksi pihak berelasi yang merugikan (*Abusive RPT's*). Alasannya bahwa suatu transaksi pihak berelasi bersifat material akan mengarahkan suatu perusahaan bergantung pada transaksi tersebut dengan berlebihan sehingga menuntut auditor untuk memastikan pihak berelasi tersebut benar benar ada. Hung dan Cheng (2018) mengungkapkan bahwa peningkatan kompleksitas informasi perusahaan yang sejalan dengan jumlah transaksi pihak berelasi dapat meningkatkan probabilitas sanksi bagi auditor.

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji biaya audit yang dipengaruhi transaksi pihak pihak yang berelasi (Habib et al, 2015; Al Dhamari, 2018). Namun penelitian tersebut masih mempunyai pemahaman yang terbatas. Pertama, penelitian tersebut memperoleh hasil yang beragam secara umum maupun jenis transaksinya (*borrowing* dan *lending*, *sales* dan *purchase*). Sedangkan penelitian Habib et al (2015) dan al-Dhamari (2018) mengungkapkan bahwa secara umum, transaksi pihak berelasi dapat meningkatkan biaya audit. Perbedaan hasil penelitian juga dapat dilihat dari jenis transaksi pihak berelasi yang mempengaruhi biaya audit. Berbeda dengan hasil yang diperoleh oleh Habib (2015) dan Nanwi et al (2015), penelitian Kohlbeck dan Mayhew (2017) dan Al-Dhamari (2018) mengungkapkan bahwa transaksi penjualan serta pembelian yang melibatkan pihak pihak berelasi dapat meningkatkan biaya audit. Oleh sebab tersebut, pada penelitian ini penulis akan menguji hubungan transaksi pihak berelasi

pada biaya audit secara lebih mendalam yang dilakukan dengan cara memperluas cakupan penelitian dibandingkan penelitian terdahulu.

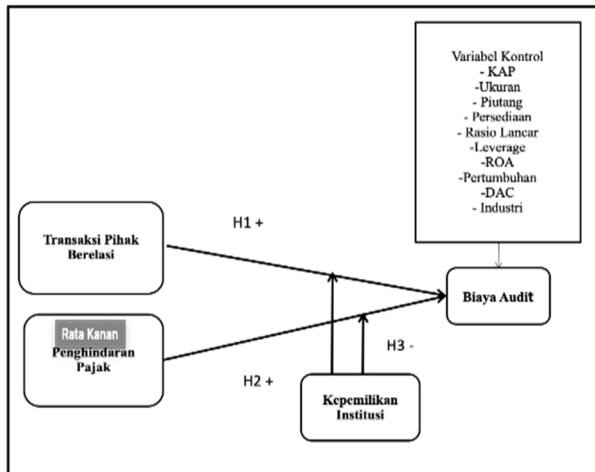
Selain aktivitas penghindaran pajak dan transaksi pihak berelasi, suatu faktor tata kelola dapat juga memiliki peran pada hubungan penghindaran pajak, transaksi pihak berelasi dan biaya audit. Salah satunya adalah kepemilikan institusi. Kepemilikan institusi dipercaya dapat menjadi external monitoring bagi perusahaan. Investor institusi mempunyai peluang, kemampuan dan sumber daya untuk memantau kinerja manajemen. Investor institusi mempunyai motivasi lebih besar dalam menghimpun suatu informasi serta mengawasi aktivitas perusahaan tersebut secara lebih menyeluruh dan efisien (Burn et al, 2010). Meningkatnya pengawasan pada tindakan manajemen akan mengurangi kemampuan manajemen dalam menyalahgunakan sumberdaya perusahaan untuk kepentingannya sendiri (Cleary et al, 2017) sehingga kesalahan perilaku manajemen seperti manipulasi akuntansi, diskresi manajemen akan menjadi semakin terbatas. Menurut Mitra et al (2007) kepemilikan institusi mempunyai pengaruh negatif pada *audit fee*. Kesimpulannya, kepemilikan institusi pada perusahaan dapat menurunkan *audit fee*. Karena hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji peran kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan kompleksitas informasi perusahaan (transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak) dengan biaya audit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini mencoba memeriksa hubungan kompleksitas informasi perusahaan (penghindaran pajak dan transaksi pihak berelasi) dan biaya audit dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Penelitian ini penting untuk dilakukan berkaitan dengan 5 hal. Pertama, Diyanti et al., (2012) mengungkapkan perusahaan yang ada di Indonesia mempunyai kepemilikan yang terpusat lebih dari 95% beserta sistem tatakelola yang masih belum optimal. Rendahnya implementasi sistem tatakelola menyebabkan kurangnya proteksi bagi pemegang saham minoritas (La porta, 2000) sehingga berdampak pada terjadinya aktivitas *tunneling* karena implementasi sistem tatakelola yang efektif dipercaya dapat memperlemah terjadinya transaksi antar pihak berelasi yang bersifat *abusive*. Disamping itu, lebih dari 90% perusahaan yang *listing* di Bursa

Indonesia melakukan berbagai jenis transaksi antar pihak berelasi (Utama dan Utama, 2013). Hal ini karena lingkungan bisnis Indonesia memiliki banyak perusahaan yang terafiliasi. Penelitian R Nurazi (2015) memberikan bukti empiris bahwa sejumlah besar perusahaan publik di Indonesia melakukan ekspropriasi dalam bentuk *tunnelling* yang diidentifikasi melalui transaksi pihak berelasi (*Abusive RPT*). Kedua, IAPI telah menentukan imbalan jasa audit atas laporan keuangan melalui Peraturan No 2 Tahun 2016. Namun kebijakan mengenai imbalan jasa audit ini, belum tentu di patuhi oleh Kantor Akuntan Publik. Hal ini karena belum adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran penetapan biaya audit. Penelitian Ardiana (2014) juga mengungkapkan bahwa Kantor Akuntan Publik besar dan bereputasi tinggi di Indonesia cenderung menerima klien dengan resiko yang tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kantor Akuntan Publik di Indonesia beroperasi pada ancaman litigasi yang rendah. Ketiga, tingkat kepatuhan pajak masih rendah sehingga masih banyak perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak ("*Tax Compliance*", 2014). Keempat, penelitian sebelumnya (Al-Dhamari et al.,2018; Kohlbeck dan Mayhew, 2017; Habib et al.,2015) hanya mengkaji pengaruh transaksi pihak-pihak berelasi dan penghindaran pajak pada biaya audit tanpa adanya menguji peran kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H1: Transaksi pihak berelasi mempunyai pengaruh positif terhadap biaya audit
- H2: Penghindaran pajak mempunyai pengaruh positif terhadap biaya audit
- H3a: Kepemilikan institusional dapat memperlemah hubungan positif antara pihak berelasi dan biaya audit
- H3b: kepemilikan institusional dapat memperlemah hubungan positif antara penghindaran pajak dan biaya audit



2. Metode Penelitian

2.1 Sampel dan Data

Sampel penelitian ini adalah 241 tahun-perusahaan yang telah diterbitkan BEI dengan periode penelitian 2013 – 2017. Data dikumpulkan dari laporan tahunan perusahaan, serta data keuangan diperoleh dari database Thomson Reuters Eikon

2.3 Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah biaya audit (FEE). IAPI (2016) mendefinisikan biaya audit adalah kompensasi yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. Variabel independent dalam penelitian ini adalah transaksi pihak berelasi (RPT) dan penghindaran pajak (TA). Transaksi pihak berelasi melibatkan penjualan, pembelian, dan peminjaman. Kemudian, penghindaran pajak (TA) diukur melalui Cash ETR. Cash ETR dapat menangkap aktivitas penghindaran pajak secara lebih luas seperti income shifting, investasi beresiko pada asset, aturan penyusutan yang berguna dalam pengurangan pajak serta kredit pajak (Dyreg et al.,2008, 2017). Sedangkan variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional (INS_OWN). Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase (Nabela, 2012). Kepemilikan institusional termasuk saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, reksa dana, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, dan dana pensiun (Lim,2010).

Penelitian ini juga memasukan beberapa variabel pengendali yang biasa digunakan dalam penelitian biaya audit seperti ukuran perusahaan (SIZE), kantor akuntan publik big 4 (BIG4),

ROA, pertumbuhan perusahaan (GROWTH), current ratio (CR). Piutang/total asset (RECEIV), persediaan/total asset (INVEN), rasio leverage (LEV), akrual diskresioner (DACC) dan sector industry (INDUSTRY)

2.4 Pengujian Model dan Analisis Data

Model 1 menguji pengaruh pengaruh *tax avoidance* dan transaksi pihak terhadap biaya audit. Model regresi yang akan digunakan untuk menguji hipotesis H1 dan H2 adalah sebagai berikut :

$$F_{it} = \alpha_0 + \beta_1 R_{it} + \beta_2 T_{it} + \beta_3 S_{it} + \beta_4 B_{it} + \beta_5 C_{it} + \beta_6 R_{it} + \beta_7 I_{it} + \beta_8 L_{it} + \beta_9 G_{it} + \beta_1 R_{it} + \beta_1 D_{it} + \beta_1 I_{it} + \epsilon_{it}$$

Sedangkan Model 2 menguji pengaruh kepemilikan institusional dalam mempengaruhi hubungan antara transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak terhadap biaya audit. Model regresi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

$$F_{it} = \alpha_0 + \beta_1 R_{it} + \beta_2 T_{it} + \beta_3 I_{it} + \beta_4 I_{it} + \beta_5 I_{it} + \beta_6 S_{it} + \beta_7 B_{it} + \beta_8 C_{it} + \beta_9 RE_{it} + \beta_1 I_{it} + \beta_1 L_{it} + \beta_1 G_{it} + \beta_1 R_{it} + \beta_1 D_{it} + \epsilon_{it}$$

Tabel 2.1 Definisi Variabel

Variabel	Keterangan
FEE	Jumlah biaya audit yang dibayar ke auditor eksternal
TA	Penghindaran pajak dengan 2 proksi ETR yaitu current ETR dan cash ETR
RPTs	Jumlah transaksi yang terdiri dari transaksi antar pihak saling berelasi yang melibatkan penjualan, pembelian, utang non usaha, dan piutang non usaha
RPT_OP	Transaksi antar pihak saling berelasi yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan yaitu penjualan dan pembelian
RPT_LEND	Transaksi pihak berelasi yang berasal dari aktivitas non operasional perusahaan yaitu piutang dan utang non usaha
RPT_DOS	Jumlah transaksi pihak

	berelasi yang dilakukan dengan DOS (Director, officer, shareholder) terdiri dari operasional (penjualan/pembelian) dan pinjaman
RPT_INVESTEE	Jumlah transaksi pihak berelasi yang dilakukan dengan Investee (<i>Join Venture & subsidiaries</i>) terdiri dari penjualan, pembelian, piutang non usaha dan utang non usaha
INS_OWN	Persentase kepemilikan institusional
INSOWN*TA	Interaksi antara kepemilikan institusional (INSOWN) dan penghindaran pajak (TA) yang berasal dari Current ETR dan Cash ETR
INSOWN*RPT	Interaksi antara kepemilikan institusional (INSOWN) dan transaksi pihak berelasi (RPT)
BIG4	Dummy 1 apabila perusahaan di audit oleh Kantor Akuntan Publik Big 4
SIZE	Logaritma total aset perusahaan
ROA	Rasio laba bersih dibagi total aset
GROWTH	Pertumbuhan pada aset
CR	Rasio dari aset lancar dibagi utang lancar
RECEIV	Rasio dari piutang dibagi dengan total aset
INVENTORY	Rasio dari total persediaan dibagi dengan total aset
LEVERAGE	total utang dibagi dengan total aset
DAC	Nilai diskresionari akrual
INDUSTRY	Jenis industry perusahaan

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak terhadap biaya audit

Tabel 3.1 Hasil Model Penelitian 1
(Hipotesis 1 dan 2)

Variabel	Prediksi			
		Koefisien	p-value	Sig
RPT	+	0,0001	0,000	**
TA	+	- 144,5784	0,109	
SIZE	+	369,4818	0,000	***
BIG4	+	543,6383	0,000	***
CR	-	- 56,5856	0,047	**
LEV	+	-564,2922	0,015	**
GROWTH	+	- 2,1603	0,062	*
RECEIV	+	- 82,0608	0,416	
INVEN	+	436,4881	0,069	*
ROA	+	334,5005	0,241	
DAC	+	-265,2680	0,076	*
Industry		Yes		
Obs.		241		
F-stat		582,81		
Prob		0,000		

Sumber: Hasil STATA 14.0 yang diolah kembali (2019)

Berdasarkan tabel 3.1 hasil Model penelitian 1 memiliki nilai Prob sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Sehingga ,seluruh variabel independen dalam model 1 berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependennya.

Pengujian pengaruh transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak terhadap biaya audit dijelaskan pada model 1. Dari Tabel 3.1, terbukti bahwa transaksi pihak berelasi dapat meningkatkan biaya audit yang dikenakan oleh auditor sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis 1 diterima. Hasil ini sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah membuktikan bahwa transaksi pihak berelasi berhubungan positif terhadap biaya audit (Habib et al., 2015; Al-Dhamari et al.,2018).

Auditor percaya bahwa transaksi pihak berelasi yang dilakukan di Indonesia bersifat oportunistik. Kurangnya *arm's length relationship* dalam transaksi pihak berelasi dapat meningkatkan peluang terjadinya memanipulasi transaksi, penetapan harga sehingga menyulitkan auditor untuk mendapatkan cross-confirmation dari sumber independen (Fang et al.,2018) . Oleh karena itu Kantor Akuntan Publik akan memperluas lingkup dan upaya auditnya. Selain itu, *restatement* pada perusahaan akan semakin besar pada perusahaan yang terlibat dalam transaksi pihak berelasi karena banyaknya salah saji material. Akibatnya auditor akan membebankan biaya audit yang lebih tinggi untuk menutupi resiko litigasi akibat gagal mengidentifikasi salah saji material (Habib, 2015; Al-Dhamari, 2018). Sehingga ketika semakin tinggi upaya audit yang dilakukan auditor untuk mengumpulkan bukti audit dan

melaksanakan prosedur audit maka semakin besar pula biaya audit yang dikenakan oleh auditor (Simunic, 1980).

Kemudian, tabel 3.1 juga menunjukkan hasil regresi dari pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya audit. Hasil regresi memperlihatkan penghindaran pajak bahwa tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap biaya audit sehingga Hipotesis 2 ditolak. Terdapat beberapa argumen yang dapat menjelaskan hal tersebut, antara lain masih rendahnya tingkat penghindaran pajak perusahaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 hingga 2017 yang berada diatas tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah (statutory tax rate). Hal ini menyebabkan auditor tidak menetapkan resiko litigasi dan upaya audit yang besar akibat penghindaran pajak sehingga tidak berpengaruh terhadap biaya audit.

Terdapat beberapa variabel kontrol yang terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap biaya audit secara signifikan yaitu ukuran perusahaan (SIZE), KAP (BIG4), current ratio (CR) dan persediaan (INVEN).

Kemudian, peneliti beralih pada model penelitian 2. Berdasarkan Tabel 3.2, Model penelitian 2 memiliki nilai Prob sebesar 0,0000. Maksudnya, seluruh variabel independen dalam model 2 memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependennya.

Tabel 3.2 Hasil Model Penelitian 2
(Hipotesis 3a dan 3b)

Variabel	Prediksi	Koefisien	p-value	Sig
RPT	+	0,0002	0,000	***
TA	+	-64,3927	0,321	
INSOWN	-	-6,3340	0,031	**
INSOWN_RPT	-	1,78e-6	0,048	**
INSOWN_TA	-	-12,9148	0,054	**
SIZE	+	329,8041	0,000	***
BIG4	+	540,8519	0,000	***
CR	-	-43,1803	0,101	
LEV	+	-371,2557	0,070	*
GROWTH	+	2,9208	0,032	**
RECEIV	+	-341,6456	0,183	
INVEN	+	231,2438	0,248	
ROA	+	311,2223	0,261	
DAC	+	-454,6033	0,000	***
Industry		Yes		
Obs		241		
F-stat		1089,11		
Prob		0,000		

Sumber : Hasil STATA 14.0 yang diolah kembali (2019)

Hipotesis 3a digunakan dalam penelitian ini untuk untuk memprediksi bahwa kepemilikan saham institusi mampu memperlemah hubungan

antara transaksi pihak berelasi yang dilakukan perusahaan dengan biaya audit. Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat dari hasil regresi bahwa kepemilikan institusi tidak dapat memperlemah hubungan antara transaksi pihak berelasi dan biaya audit walaupun mempunyai hasil yang signifikan tetapi memili arah prediksi yang berlawanan sehingga hipotesis 3a ditolak. Kemudian dapat kita lihat bahwa kepemilikan institusi juga dapat memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan biaya audit sehingga hipotesis 3b diterima. Hal ini dapat dijelaskan Seiring dengan pemantauan dari investor insitusi, resiko yang dihadapi auditorpun akan berkurang dalam mengaudit dan hal ini akan berdampak pada biaya audit. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Mitra et al (2007) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan institusi mampu mengurangi biaya audit.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap biaya audit. Masih rendahnya tingkat penghindaran pajak perusahaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 hingga 2017 yang berada diatas tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah (statutory tax rate). Hal ini menyebabkan auditor tidak menetapkan resiko litigasi dan upaya audit yang besar akibat penghindaran pajak sehingga tidak berpengaruh terhadap biaya audit.

Transaksi antar pihak berelasi berpengaruh pada biaya audit. Hal ini karena auditor percaya bahwa transaksi pihak berelasi yang dilakukan di Indonesia bersifat oportunistik.

Kepemilikan institusi terbukti dapat memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan biaya audit. Dengan adanya kepemilikan institusi sebagai *external monitoring* yang baik maka pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya audit diharapkan dapat diminimalisir.

Penelitian ini mempunyai implikasi terhadap berbagai pihak, diantara ilmu pengetahuan, auditor, perusahaan dan regulator. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini memberikan masukan pada literatur mengenai pengaruh kompleksitas informasi perusahaan yang berasal dari aktivitas penghindaran pajak dan transaksi pihak berelasi terhadap biaya audit.

Serta bagaimana pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan keduanya. Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh dalam memoderasi hubungan keduanya.

Bagi auditor, hasil penelitian ini dapat menjadi tingkat eskensif dari prosedur audit yang dilakukan dalam menghadapi resiko yang berasal dari transaksi pihak berelasi di Indonesia. Dengan terbuktinya transaksi pihak berelasi dapat meningkatkan biaya audit, auditor harus lebih hati-hati dalam menilai resiko audit yang timbul dari transaksi pihak berelasi. Sedangkan untuk penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, auditor tidak terlalu memandang aktivitas tersebut sebagai suatu hal yang bersifat oportunistik sehingga aktivitas penghindaran pajak tidak terlalu berpengaruh pada biaya audit yang dikenakan oleh auditor. Bagi perusahaan, penelitian ini akan berimplikasi pada manajemen. Dengan adanya hasil dari penelitian ini, manajemen dapat memprediksi biaya audit yang akan dibayar oleh perusahaan. Manajemen dapat mengetahui bahwa transaksi pihak berelasi dapat menjadi pertimbangan auditor dalam meningkatkan biaya audit sehingga untuk kedepannya manajemen dapat melakukan perencanaan terhadap transaksi pihak berelasi. Dengan demikian, manajemen dapat berusaha untuk meminimalisir resiko yang ditimbulkan oleh transaksi pihak berelasi sehingga lebih dapat meminimalkan biaya audit.

Daftar Pustaka

- Armstrong, Christopher. 2015. Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, vol. 60: pp 1-17.
- Abdul-Rahman, Adekunle., Benjamin. 2017. Effect of Audit Fees on Audit Quality: Evidence from Cement Manufacturing Companies in Nigeria. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research* Vol.5, No.1, pp. 6-17
- Ahmad, A. C. dan K. A. Houghton. 2001. "The Effect of Ethnicity on Audit Pricing". Tesis dipublikasikan, School Accounting, Universiti Utara Malaysia.
- Al-Dhamari, R.A., Al-Gamrh, B., Ku-Ismail, K. J and Haji-Ismail, S.S. (2018). Related party transactions and audit fees: the role of the internal audit function. *Journal of Management & Governance*, pp. 1-24.
- Bennouri, M., Nekhili, M., & Touron, P. (2015) Does Auditor Reputation "Discourage" Related-Party Transactions? The French Case. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 34 (4), pp. 1-32
- Burns, N., Kedia, S. and Lipson, M. (2010), "Institutional ownership and monitoring: evidence from financial misreporting", *Journal of Corporate Finance*, Vol. 16 No. 4, pp. 443-455.
- Borisova, G., Brockman, P., Salas, J. M., & Zagorchev, A. (2012). *Government ownership and corporate governance: Evidence from the EU*. *Journal of Banking & Finance*, 36(11), 2917–2934. doi:10.1016/j.jbankfin.2012.01.008
- Chan, K.H., P.L.L. Mo, and T. Tang, 2016. "Tax avoidance and tunneling: Empirical analysis from the agency perspective." *Journal of International Accounting Research*, 15 (3).
- Chen, S., K. Wang, and X. Li. 2012. Product-market competition, ultimate controlling structure, and related-party transactions. *China Journal of Accounting Research* 5: 293–306.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95:41-61
- Choi, W.; Koh, Y.; Cho, J. 2011. Related party transactions and tax avoidance. *Korean J. Tax. Res.*, 28, 9–35
- David A. Guenther, Steven R. Matsunaga, and Brian M. Williams (2017) Is Tax Avoidance Related to Firm Risk?. *The Accounting Review*: January 2017, Vol. 92, No. 1, pp. 115-136.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179.

- Donohoe, M. P., & Robert Knechel, W. (2014). Does Corporate Tax Aggressiveness Influence Audit Pricing. *Contemporary Accounting Research*, 31(1), 284–308
- Eshleman, John Daniel and Peng Guo. 2014. Abnormal Audit Fees and Audit Quality: The Importance of Considering Managerial Incentives in Tests of Earnings Management. *Auditing: A Journal of Practice & Theory: February 2014, Vol. 33, No. 1, pp. 117-138.*
- Fitri, N., G Irianto, E Mardiaty. (2017). The Effect of Ownership Structure on the Expropriation Risk. *International Business Management*. Vol 11(2): 392-396
- Hanlon, M., and S. Heitzman. 2010. A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics* 50 (2/3): 127–178.
- Hanlon, M., Krishnan and Lillian, M. 2012. Audit Fees and Book Tax Differences. *American Accounting Association*, vol 34: pp 55-86
- Harford, J., Kecskes, A. And Mansi, S. (2015). Do long term investors improve corporate decision making?, Working paper, York University, Toronto
- Habib, A., Jiang, H., & Zhou, D. (2015). Related-party transactions and audit fees: Evidence from China. *Journal of International Accounting Research*, 14(1), 59–83.
- Homayoon, S and Maryam, H. 2017. Audit Fee and Audit Quality : An Empirical Analysis in Family Firms. 7(2)
- Hu, N.J. (2018). Tax Avoidance, Property Rights and Audit Fees. *American Journal of Industrial and Business Management* , 8, 461-472.
- Hung, Y. S, dan Cheng. Y. C. 2018. The Impact Information Complexity on Audit Failures from Corporate Fraud : Individual Auditor Level Analysis. *Asia Pasific Management Review*. 23(2), 72-85
- Habib A., Abdul Haris Muhammadi Haiyan Jiang. 2017. Political connections, related party transactions, and auditor choice: Evidence from Indonesia. *Journal of Contemporary Accounting & Economics* 13 pp 1–19
- Habib A., Muhammadi, Abdul Haris., Haiyan Jiang, (2018) "Political connections and audit report lag: Indonesian evidence", *International Journal of Accounting & Information Management*, Vol. 26 Issue: 1, pp.59-80
- Huyghebaert, N., & Wang, L. (2012). Expropriation of Minority Investors in Chinese Listed Firms: The Role of Internal and External Corporate Governance Mechanisms. *Corporate Governance: An International Review*, 20(3), 308–332. doi:10.1111/j.1467-8683.2012.00909.
- W. Sean Cleary, Jun Wang, (2017) "Institutional investors, monitoring and corporate finance policies", *International Journal of Managerial Finance*, Vol. 13 Issue: 2, pp.186-212,
- Lee, S.; Yoon, S. 2012. Income shifting using internal trading within business group. *Korean J. Tax. Res.*, 29, pp 121–156.
- Keskinen, A., Aaltonen, M., & Kelly, E. M. (2003). *Organisational Complexity*. FFRC Publications.
- Hornigren, C.T., S.M. Datar, and G. Foster. 2012. *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. 14th Edition, Prentice Hall.
- Jensen, Michael C. William H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics* Volume 3, Issue 4, October, Pages 305-360
- Jian, M., and T. J. Wong. 2010. Propping through related-party transactions. *Review of Accounting Studies* 15 (1): pp 70–105.
- Juvita, Desriana., Siregar, Sylvia Veronica. 2013. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Hubungan Besaran Dan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Dengan Manajemen Laba: Studi Empiris Perubahan

- Psak No. 7 Jurnal Akuntansi & Auditing
Volume 10/No. 1/November : 45 – 67
- Kahn, Jeremy dan Jesse Drucker. 2016.
[https://www.bna.com/google-cut-taxes-n57982067554/Diakses-pada-21-November-2018.](https://www.bna.com/google-cut-taxes-n57982067554/Diakses-pada-21-November-2018/) / Google Cut Taxes by \$2.4 Billion Using European Subsidiaries.
- Khanna, T., and K. Palepu. 2000. Is group affiliation profitable in emerging markets? An analysis of diversified Indian business groups. *The Journal of Finance* 55 (2): 867.
- Kohlbeck, M. J. & Mayhew, B. W. (2017). Are Related Party Transactions Red Flags?. *Contemporary accounting research* Vol . 34, issue , pp 900-928
- Park, Sungwon. 2018. Related Party Transactions and Tax Avoidance of Business Groups. *Sustainability* 2018, 10(10), 3571
- Linder, Stefan and Foss, Nicolai J., Agency Theory (April 23, 2013). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2255895> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2255895>
- Mitra, S., Hossain, M & Deis, D (2007). The emperical relationship between ownership characteristics and audit fee. *Review of Quantitative Finance & Accounting*, 28 (3), 257-285
- Nurazi, Ridwan and Santi, Fitri and Usman, Berto, Tunnelling: Evidence from Indonesia Stock Exchange (September 17, 2015). *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*. Vol. 11 No. 2 Pages. 127-150. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2822925>
- Siswanti, Arie. 2017. *Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Fee Audit Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Pemediasi*. Thesis, Universitas Airlangga
- Sun, Q., Tong, W. H. S., & Tong, J. (2002). *How Does Government Ownership Affect Firm Performance? Evidence from China's Privatization Experience*. *Journal of Business Finance Accounting*, 29(1&2), 1–27. doi:10.1111/1468-5957.00422
- Utama, CA., 2015. “Penentu Besaran Transaksi Pihak berelasi: Tata Kelola, Tingkat Pengungkapan, dan Struktur Kepemilikan [The magnitude of the Related Party's Transactions Determination: Management, Disclosure Rate, and Ownership Structure].” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 12 (1).
- Utama, C.A., Utama, S., 2013. Corporate governance, size and disclosure of related party transactions, and firm value: Indonesia evidence. *Int. J. Disc. Gov.*, 1–25
- Panda, Brahmadev, N. M. Leepsa. 2017. Agency theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives. *Indian Journal of Corporate Vol 10, Issue 1*
- Rahmany, Fuad. 2014. Tax Compliance & Enforcement in Indonesia Remain Troublesome, <http://www.indonesia-investments.com/> di akses 16 Juli 2019